

## PENGEMBANGAN MODEL STANDAR BELANJA KECAMATAN DI KABUPATEN LEBAK

\*)Juliannes Cadith, \*\*)Rina Yulianti

\*), \*\*)Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten

Email : \*)[juliannes.cadith@untirta.ac.id](mailto:juliannes.cadith@untirta.ac.id), \*)[rina.yulianti@untirta.ac.id](mailto:rina.yulianti@untirta.ac.id)

### ABSTRACT

*State budget planning has gone through many developments and changes in line with the dynamics of public sector management and demands that arise in the community which resulted in the development of performance-based budgeting systems. Budgeting based on work performance is done based on performance achievements, performance indicators, analysis of spending standards, unit price standards and minimum service standards. Spending Standards Analysis (ASB) is a standard used to analyze the reasonableness of the workload or cost of each program or activity to be carried out by a work unit within one fiscal year. This study uses secondary data used in the form of Budget Realization in 2012, 2013 and 2014 from 28 sub-districts in Lebak Regency and then verified / clarified with FGD (Focussed Group Decision). The preparation of ASB for the sub-districts in Lebak Regency conducted in this research was carried out with the following stages: Inventory, Identification, Classification, Clarification, Formulation and Due Deligent.*

*Keywords: Budget Planning, Cost Standard Analysis, Instruments*

### 1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan tuntutan masyarakat di era global, komitmen terhadap perbaikan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia mulai disuarakan sejak era reformasi di tahun 1998. Otonomi dan desentralisasi fiskal merupakan buah dari reformasi yang diperjuangkan oleh semua komponen anak bangsa. Penciptaan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas

publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta kepastian hukum merupakan cita – cita yang harus diperjuangkan bersama – sama semua komponen masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapatkan ruang yang cukup memadai dengan lahirnya Undang – undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun berdasarkan

pendekatan prestasi kerja. Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolak ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta analisa standar belanja (ASB).

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada pemerintah daerah dalam peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikenal dengan istilah Standar Analisa Belanja (SAB) yang mempunyai makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berbagai peraturan pendukung telah di keluarkan dan direvisi seperti penyempurnaan PP tersebut dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah begitu juga peraturan turunannya yang terus di sempurnakan seiring perkembangan jenis objek belanja mulai dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sampai Permendagri No. 21 Tahun 2011.

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah mengatur belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang

terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Pemerintah Kabupaten Lebak yang memiliki 27 kecamatan terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak diikuti dengan adanya standarnisasi penggunaan anggaran yang terlihat masih adanya kerancuan penyusunan suatu kegiatan yang sifatnya sejenis namun terjadi ketimpangan nominal anggaran di beberapa kecamatan sehingga terjadi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar kecamatan, yang diindikasikan disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan *output* kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumberdaya, beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja. Dampaknya pengalokasian dana yang tidak efisien dan efektif mengakibatkan terjadinya *overfinancing* dan *underfinancing* dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: penyusunan Model Analisis Standar Belanja (ASB) kecamatan di Kabupaten Lebak.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan **data Sekunder** yang digunakan berupa realisasi Anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014 dari 28 OPD Kecamatan dan data Standar Satuan Harga yang ada di peraturan bupati tentang standar harga satuan serta data data primer diperoleh dengan FGD (*Focussed Group Disscussion*). Dalam penyusunan ASB ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan ABC ( yaitu: *Activity Based Costing* (ABC), pendekatan *Ordinary Least Square* (regresi) dan pendekatan metode diskusi (*focused group discussion*).

Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah: **Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel.**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu *pertama*, metode statistik deskriptif (*mean* dan standar deviasi) untuk menentukan nilai rata-rata (tengah), nilai batas atas dan nilai batas bawah setiap jenis biaya. *Kedua*, metode statistik induktif dengan metode regresi linear sederhana (*simple regression analysis*). Regresi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu menentukan proyeksi nilai

besaran total belanja kegiatan tahun berikutnya dan menentukan proporsi jumlah biaya tetap kegiatan dan biaya variabel untuk setiap model. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara *cost* dan *volume of activity* berbentuk garis lurus/linier ( $Y = a + bX$ ), di mana Y merupakan variabel tak bebas (*dependent*) dan X merupakan variabel bebas (*independent*)

### Teknik Penentuan Biaya Tetap Dan Biaya Variabel

Kebanyakan kasus kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah, pada dasarnya susah untuk mengelompokkan biaya tetap dan biaya variabelnya. Biaya-biaya tersebut cenderung bersifat campuran (*mixed cost*). Untuk dapat memisahkan biaya total menjadi biaya tetap dan biaya variabel, dapat digunakan metode regresi (*method of least squares*), seperti tersebut dibawah ini:

#### Estimasi Koefisien

Untuk melakukan penaksiran *intercept*(*fixed cost*) dan *slope* (*avaragevarbiabile cost*), digunakan metode kuadrat terkecil biasa (*method of ordinary least squares, OLS*). Metode OLS dapat dijelaskan dengan model regresi 2 variabel berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + u$$

Sedangkan untuk lebih dari 2 variabel, bentuk persamaan seperti berikut ini:

$$Y = \beta_0 + \sum_1^n \beta_i X_i + u$$

n menunjukkan banyaknya variabel penjelas yang dalam hal ini adalah *volume of activity*.

$$\begin{aligned} Y &= \text{total cost} \\ X_1, X_2, \dots &= \text{volume of activity} \\ \beta_0 &= \text{total fixed cost} \\ \beta_1, \beta_2, \dots &= \text{tarif of variable} \end{aligned}$$

*cost*

$$u = \text{residual}$$

Regresi dengan 2 variabel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sederhana, seperti di bawah ini:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ \beta_0 &= \frac{\sum Y - \beta_1 \sum X}{n} \end{aligned}$$

### Standar Error Estimasi

Untuk menghitung standar error dari hasil estimasi digunakan formula sebagai berikut:

$$SE = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - \hat{Y})^2}{n - k}}$$

SE = *standard error of estimation*

$Y_i$  = *cost* sesungguhnya yang diamati

$\hat{Y}$  = *cost* hasil estimasi

k = jumlah keseluruhan variabel

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan persentase perubahan variabel tak bebas yang disebabkan hubungan linier dengan variabel bebas. *Cost* tidak hanya berubah dalam hubungannya dengan *volume of activity*, tetapi masih ada faktor lain (misalnya harga) yang berpengaruh terhadap perilaku *cost*. Dengan menghitung koefisien determinasi dapat diketahui berapa persen perubahan suatu *cost* yang disebabkan oleh *volume of activity*.  $R^2$  dapat dihitung dengan formula di bawah ini:

$$R = \frac{\sum (\hat{Y} - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

$\bar{Y}$  adalah rata-rata  $Y$  observasi (sesungguhnya).

### Uji Signifikansi Variabel Bebas (*Independet Variable*) uji signifikansi dilakukan dengan menggunakan uji F

Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi semua variabel independen secara bersama mempengaruhi variabel dependen. Dan uji t Uji ini digunakan untuk mendeteksi signifikansi variabel independen (secara individual) terhadap variabel dependen yang digunakan. Untuk melihat apakah variabel bebar berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas digunakan uji beda rata-rata koefisien terhadap nol. Jika sama dengan nol berarti

tidak signifikan dan jika tidak sama dengan nol berarti signifikan berpengaruh. Terdapat 2 macam uji, yaitu Uji F dan Uji t. Kedua uji tersebut menggunakan dasar hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_A : \beta_i \neq 0$$

### 3. Pendekatan Metode Diskusi (*focused group discussion*)

Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masuk-masukan dari SKPD tentang aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKPD dalam penyusunan ASB.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pembentukan model ASB kecamatan di Kabupaten Lebak dilakukan melalui lima tahapan yang saling terkait satu dengan yang lain, proses ini dimulai dari inventarisasi dan identifikasi berbagai program dan kegiatan yang dilakukan kecamatan. Inventarisasi dan identifikasi dilakukan dengan membedah realisasi anggaran Kab Lebak tahun 2012, 2013 dan 2014 proses ini menghasilkan data perkegiatan, alokasi anggaran (pagu

anggaran) dan output dari kegiatan- kegiatan yang dilakukan semua kecamatan di Kab Lebak.

kedua mengklasifikasikan berbagai kegiatan- kegiatan yang mempunyai rumpun desian kegiatan yang sama yang memiliki kesamaan nama kegiatan, output dan cost drivernya yang kemudian dikelompokkan menjadi satu ASB. Pada proses klasifikasi di hasilkan kegiatan- kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASBnya. Prinsip dasar pengelompokkan kegiatan berdasarkan jenis kegiatannya dengan melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan memiliki kesamaan nama kegiatan, *output* yang dihasilkan dan kesamaan *cost driver* untuk melaksanakannya. Dengan demikian, sekalipun memiliki nama kegiatan yang berbeda-beda, namun jika dilihat dari kesamaan *output* yang dihasilkan dan *cost drivernya*, sesungguhnya kegiatan dimaksud merupakan jenis kegiatan yang sama. Di tahap ketiga dilakukan klarifikasi dan kesepakatan dengan stakeholder terkait terhadap klasifikasi awal yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Tahap klarifikasi dilakukan dengan melalui FGD (*Focussed Group Discussion*) atas pengelompokan awal terkait aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok ASB tersebut. Berdasarkan tahapan

tersebut dihasilkan pengelompokan 4 kegiatan yang perlu dibuatkan ASB seperti terlihat pada tabel berikut ;

Tabel I  
ASB kegiatan kecamatan di Kabuapten  
Lebak

NO	Nama ASB	Definisi
1	Penyusunan Dokumen Rutin Kecamatan	Adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen rutin kecamatan, seperti renstra SKPD, laporan keuangan SKPD, laporan capaian kinerja SKPD, ikhtisar laporan keuangan SKPD, dan sebagainya) yang dilaksanakan secara mandiri untuk kepentingan SKPD itu sendiri. Lingkup kegiatan ini adalah SKPD Kecamatan.
2	Penyelenggaraan MUSRENBANGDES dan MUSRENBANGCAM oleh SKPD Kecamatan	Adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah/provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
3	Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Masyarakat	Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan melalui upaya pembinaan dan fasilitasi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi masyarakat dimaksud.
4	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di dalam wilayah administratif SKPD Kecamatan.

Sumber : Hasil Penelitian

Pada tahap keempat, disusun model regresi masing – masing kelompok ASB. Model regresi dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. . Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

1. Penentuan Pengendali Belanja (Cost Driver) dari Tiap – tiap Jenis Kegiatan. Pada Tahap di hasilkan pengendali belanja (Cost Driver) untuk masing-masing ASB

Tabel 2  
Pengendali Biaya (Cost Driver) ASB

NO	Nama ASB	Pengendali Belanja ( Cost Driver)
1	Penyusunan Dokumen Rutin Kecamatan	Jumlah Tim dan Lama Waktu Penyusunan (OB) dan Jumlah Dokumen.
2	Penyelenggaraan MUSRENBANGDES dan MUSRENBANGCAM oleh SKPD Kecamatan	Jumlah Peserta x Lama Waktu
3	Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang dibina.
4	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Desa dalam Kecamatan

Sumber : Hasil Penelitian

2. Penentuan Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk Setiap Jenis Kegiatan.

Teknik yang digunakan untuk menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari:

- a. Metode Scatterplot, tujuannya adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak.
- b. Metode High-low, tujuannya untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan lebih dahulu memilih dua titik (titik tertinggi dan titik terendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik

dengan tingkat output atau aktivitas terendah.

- c. Metode Least Square, tujuannya untuk menentukan prediksi persamaan garis terbalik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Metode least Square dapat dilakukan dengan bantuan software berupa SPSS dengan menggunakan model regresi sederhana.

Dari tahapan ini dihasilkan Fixed cost dan Variabel Cost untuk masing – masing ASB yang kemudian di hasilkan Formula ASB untuk masing Kegiatan sebagai berikut :

**a. Formula ASB: Untuk Penyusunan Dokumen Rutin Kecamatan**

$$Y = \text{Rp } 7.064.134 + (\text{Rp } 108.016 X1) + (\text{Rp } 12.866 X2) + \text{Uang Lembur} + \text{Belanja Jasa Konsultan}$$

**Di mana:**

Y : Prediksi Total Belanja

a : Belanja Tetap = Rp. 7.064.134,-

b1 : Belanja Variabel 1 = Rp.  
108.016,-

b2 : Belanja Variabel 2 = Rp.  
12.866,-

X1 : Jumlah Tim dan Lama Waktu

Penyusunan (OB)

X2 : Jumlah Dokumen

Di mana dalam rumusan ini dihasilkan belanja tetap, belanja variabel serta belanja uang lembur dan belanja jasa konsultasi (khusus untuk belanja jasa konsultasi ditambahkan bila kecamatan tidak memiliki tenaga ahli serta biaya lembur dianggarkan bila kegiatan tersebut membutuhkan tambahan waktu. Rumusan formula tersebut sebagai berikut ;

**Belanja Jasa Konsultansi**

Belanja Jasa konsultansi dapat dianggarkan jika dalam hal instansi pelaksana proyek/kegiatan tidak memiliki tenaga ahli dan atau kemampuan yang cukup untuk mengerjakannya sendiri.

**Uang Lembur**

Uang lembur hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud membutuhkan tambahan waktu ekstra (melebihi waktu kerja normal) dalam menyelesaikan pekerjaan. Tambahan waktu ekstra dapat terjadi jika sifat pekerjaan sangat mendesak untuk diselesaikan (a). Sifat pekerjaan yang mengharuskan bekerja di luar jam kerja normal; (b) Adanya batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dan/atau (c). Karena beban kerja yang melebihi kapasitas tenaga

penyelenggara yang tersedia untuk melaksanakannya.

Uang lembur dihitung dengan cara mengalikan jumlah pegawai yang lembur dengan jumlah jam lembur dengan standar biaya lembur yang berlaku ( $\text{Biaya lembur} = \Sigma \text{Pegawai} \times \Sigma \text{Jam Lembur} \times \text{Standar Biaya Lembur}$ ).

**b. Formula ASB:** Penyelenggaraan MUSRENBANGDES dan MUSRENBANGCAM oleh SKPD Kecamatan

$$Y = \text{Rp } 16.687.650 + ((53,353 X) + \text{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah})$$

**Di mana:**

Y : Prediksi Total Belanja

a : Belanja Tetap = Rp.

16.687.650,-

b : Belanja Variabel = Rp. 53.353,-

X : Jumlah Peserta x Lama Waktu (OH)

**Belanja Perjalanan Dinas Dalam**

**Daerah:**

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dianggarkan jika kegiatan dimaksud dilaksanakan di dalam wilayah kota Kab. Lebak atau kegiatan dimaksud memerlukan koordinasi dengan kecamatan lain di dalam Kab. Lebak.

Besarnya nilai Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dihitung dengan cara mengalikan jumlah orang dengan standar perjalanan dinas dalam daerah sesuai ketentuan yang berlaku ( $\Sigma \text{Orang} \times \text{Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah}$ ).

**c. Formula ASB: Peningkatan Pelayanan Kepada Organisasi Kemasyarakatan**

$$Y = \text{Rp } 57.333.792 X$$

**Di mana:**

Y : Prediksi Total Belanja

b : Belanja Variabel = Rp. 57.333.793,-

X : Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina

**d. Formula ASB: Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.**

$$Y = Y = \text{Rp } 33.570.349 X$$

**Di mana:**

Y : Prediksi Total Belanja

b : Belanja Variabel = Rp. 33.570.349,-

X : Jumlah Desa dalam Kecamatan

3. Penentuan Nilai Rata-rata (Mean, Batas Atas, dan Batas bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja)

Nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendalian belanjanya.

Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok ASB. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas, dan batas bawah adalah sebagai berikut :

- a. Nilai rata-rata : Total Nilai/Jumlah Data
  - b. Nilai Batas Bawah : (Nilai Rata-rata – Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata
  - c. Nilai Batas Atas : (Nilai Rata-rata + Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata
- Penentuan nilai rata-rata dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dengan analisis deskriptif statistik.

Pada tahap ini dihasilkan nilai rata – rata (mean, batas atas, dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja)

- a. Rata – Rata (mean, batas atas, dan batas bawah untuk masing-masing

sebaran belanja) untuk ASB: Penyusunan Dokumen Rutin Kecamatan

Tabel 3 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan

No	Rincian Objek Belanja	Proporsi Minimal	Rerata Proporsi	Proporsi Maksimal
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.63%	8.04%	12.44%
2	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	24.62%	33.85%	43.09%
3	Belanja cetak	4.92%	11.34%	17.77%
4	Belanja Penjilidan	5.01%	6.32%	7.63%
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.67%	11.28%	16.90%
6	Belanja Penggandaan/Foto Copy	22.82%	29.16%	35.50%
	Jumlah		100 %	
7	Uang Lembur	Dianggarkan Sesuai Kebutuhan		
8	Belanja Jasa Konsultan	Dianggarkan Sesuai Kebutuhan		

Sumber : Hasil penelitian

- b. Rata – Rata (mean, batas atas, dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja) untuk ASB Penyelenggaraan Musrembangdes dan Musrembangcam OLEH OPD Kecamatan

Tabel 4 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan

No	Rincian Objek Belanja	Proporsi Minimal	Rerata Proporsi	Proporsi Maksimal
1	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	66.05%	98.69%	100.00%
2	Belanja Penjilidan	0.61%	1.31%	2.00%
	Jumlah		100%	
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Dianggarkan Sesuai Kebutuhan		

Sumber : Hasil Penelitian

- c. Rata – Rata (mean, batas atas, dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja) untuk ASB: Peningkatan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan.

Tabel 5 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan

No	Rincian Objek Belanja	Proporsi Minimal	Rerata Proporsi	Proporsi Maksimal
1	Belanja Transportasi	10.99%	20.49%	30.00%
2	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.43%	6.43%	8.43%
3	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.05%	4.55%	6.05%
4	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.64%	5.19%	8.75%
5	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	46.52%	61.55%	76.58%
6	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi Operator/Assisten	0.03%	1.79%	3.54%
	Jumlah		100%	

Rata – Rata (mean, batas atas, dan batas bawah untuk masing-masing sebaran belanja) untuk ASB: Peningkatan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan.

Tabel 6 Proporsi Alokasi Belanja Perkegiatan

No	Rincian Objek Belanja	Proporsi Minimal	Rerata Proporsi	Proporsi Maksimal
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.69%	6.82%	8.96%
2	Belanja cetak	4.11%	5.81%	7.51%
3	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.66%	22.10%	27.54%
4	Honorarium Pelaksana Kegiatan	0.08%	0.58%	1.08%
5	Belanja Penjilitan dan	0.40%	0.58%	0.77%
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.71%	25.51%	33.30%
7	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.25%	14.55%	22.85%
8	Honorarium Peneliti/Instruktur/Narasumber	16.76%	24.04%	31.32%
	Jumlah		100%	

Kelima , Due diligent Dalam tahapan ini dilakukan simulasi formula terhadap sebuah kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap kewajaran Biaya yang di hasilkan.

#### 4. Simpulan

- a. Model penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan terhadap Anggaran Pemerintah kecamatan yang dilakukan melalui tahapan –tahapan : a). Inventarisasi,identifikasi, Klasifikasi,Klarifikasi, Pembuatan Model dan Due diligent.
- b. Hasil analisis kewajaran belanja berdasarkan persentase batas bawah dan batas atas yang diperoleh dari pengolahan data dapat diketahui kewajaran belanja kegiatan, dan untuk pengendalian besaran belanja agar tidak terlalu besar persentase batas bawah dan batas atasnya, digunakan estimasi persentase batas bawah dan batas atas sewajarnya.

#### Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pohan, Adolp, 2007, *Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*, dalam

*Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri  
Bunga Rampai Manajemen  
Keuangan Daerah, Penyunting:  
Abdul Halim dan Theresia  
Damayanti, UPP STIM YKPN,  
Yogyakarta.*

Ritonga, Irwan Taufiq, 2010, *Analisis  
Standar Belanja: Konsep, Metode  
Pengembangan, dan Implementasi di  
Pemerintah Daerah, Sekolah  
Pascasarjana UGM, Yogyakarta.*

Universitas Gadjah Mada (UGM), 2000,  
“Standar Analisa Belanja Anggaran  
Daerah”, *Executive Summary*, Kerja  
Sama Antara Setwilda Propinsi Jawa  
Tengah Dengan PAU Universitas  
Gadjah Mada, Yogyakarta.